

**PENGEMBANGAN ASPEK MORAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN SD DAN SMP:
Respons atas Realitas Keprihatinan Moral¹**

Oleh Suharno, M.Si.²

A.Pendahuluan

Tak dapat disangkal, realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia mengalami fenomena semakin menipisnya horizon moralitas. Gejala demikian hampir merata di berbagai bidang, semisal politik, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Menggunakan sudut pandang yang lain pun tidak jauh berbeda, publik dan privat misalnya, juga mengalami gejala yang sama. Batas baik dan buruk, hitam dan putih, *haq* dan batil, semakin disumirkan dalam tata masyarakat kita.

Kondisi demikian menuntut kita untuk mencermati secara serius apa akar persoalan dari gejala tersebut dan bagaimana upaya-upaya kita untuk mengatasi persoalan dekadensi moral di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak, secara akademis kita melakukan telaah-telaah kontekstual atas fenomena demikian, untuk kemudian dicari solusi yang komprehensif.

Masyarakat memiliki ekspektasi yang luar biasa terhadap dunia pendidikan. Mereka secara sengaja menyandarkan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah mereka ke “pundak” dunia pendidikan. Dalam struktur masyarakat yang sangat sederhana, orang alim (yang banyak tahu) sering kali dijadikan referensi dalam mengatasi problema hidup yang mereka alami. Perilaku buruk yang ditunjukkan oleh orang tak berpendidikan acap diwajarkan. Tidak demikian halnya jika hal demikian dilakukan oleh orang berpendidikan.

Dengan demikian, pendidikan harus memiliki andil yang jelas dalam melakukan perubahan, dalam makna yang positif. Tak terkecualikan,

¹ Disampaikan dalam Pelatihan Guru PKN SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, 10 Juli 2007

² Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FISE Universitas Negeri Yogyakarta

pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang sama, meski bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya bermakna bahwa memasrahkan perbaikan moral bangsa pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah jelas merupakan hal mustahil.

Pembacaan atas Keprihatinan Moral

Secara terminologis, kata moral dalam paper ini dipersamakan dengan etika, sebab secara etimologis keduanya memiliki akar kata yang hampir sama.³ Jadi di dalam makalah ini dua istilah tersebut digunakan secara bergantian.

Sangat jamak penyimpangan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ukuran benar salahnya tindakan seorang manusia seringkali diabaikan dan bahkan dilanggar. Hal itu yang seringkali tampak dalam media publik kita, baik cetak maupun elektronik. Tayangan-tayangan kriminalitas di TV-TV kita, semacam *Patroli*, *Buser*, dan sebagainya merupakan kenyataan yang memprihatinkan. Pembunuhan sebagai satu kejahatan terbesar manusia atas manusia lainnya jadi tampilan sehari-hari.⁴

Kenyataan yang lain adalah maraknya korupsi. Beberapa lembaga survey memberikan gambaran relatif gamblang tentang keakutan korupsi di Indonesia. Di antaranya, hasil penelitian *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang diumumkan pada Bulan Maret Tahun 2002. Penelitian tersebut menempatkan Indonesia dengan tingkat skor 9.92 berdasarkan skala tertinggi 10. Sedangkan dari sumber *Transparency International (TI) Indonesia, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia* pada tahun 2003 menempati peringkat 122 dari 133 negara yang disurvei, dengan nilai 1,9. Pada tahun 2004, CPI Indonesia menjadi 2.0 dan

³ Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani, dari kata *ethos*, yang diantaranya berarti; kebiasaan, adapt, watak, akhlak, cara berpikir dan sebagainya. Kata “moral” berasal dari bahasa Romawi, dari kata *mos*, jamaknya *mores*, yang berarti adat, kebiasaan. Lebih jauh lihat K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 3-7. atau lihat juga Frans Magniz Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 12-15.

⁴ Pembunuhan merupakan kejahatan terbesar manusia karena destruktivitasnya yang bersifat total (Lihat K. Bertens, *Keprihatinan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 15-18). Bandingkan misalnya dengan perampokan, perkosaan, dan lain-lainnya. Dalam perampokan seseorang dijahati hartanya. Dalam perkosaan yang terenggut adalah harga dirinya. Sedangkan pembunuhan merupakan penghilangan secara menyeluruh eksistensi seseorang.

menduduki urutan 137 dari 146 negara yang disurvei. Angka-angka tersebut diyakini hanyalah merupakan fenomena gunung salju. Yang tampak hanyalah sebagian kecil tinimbang bagian lainnya yang terselubung.

Apa yang terjadi dengan masyarakat kita, bangsa Indonesia? Ada penyakit sosial yang sangat sulit untuk disembuhkan. Di antaranya oleh karena permisivitas, kejiwaan tidak mau susah-susah memfilter. Pertimbangan-pertimbangan moral logis sering tidak jalan. Di samping itu, hukum sebagai pengawal etika publik seringkali gagal menjadi alat perubahan masyarakat (*tool of social engineering*).

Hal tersebut jelas menjadi sebuah ironi tersendiri bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia di kenal sebagai bangsa besar, agamis, santun, gotong royong, dan ajektif positif lainnya, sementara di sisi lain bangsa ini juga dikenal dengan sarang korupsi dan kolusi, nepotisme dan kongkalikong *perkoncoan*, tawuran, dan bebrapa ajektif negatif lainnya. Hal ini selayaknya menjadi keprihatinan bersama.

Dimana Pendidikan menempatkan diri?

Pendidikan idealnya merupakan jalan terang bagi masyarakat yang dihadapkan pada kejumudan. Ketika kita nyaris tersesat, pendidikan seharusnya dapat menunjukkan jalan terang. Saat gelap menyergap kita, pendidikan idealnya memberikan obor yang mencerahkan.

Pendidikan dapat didefinisikan dalam tiga wilayah arti, luas, sempit, dan luas terbatas. Dalam lingkup yang luas, pendidikan dapat dimaknai sebagai segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hidup dalam segala lingkungan. Sedangkan definisi pendidikan dalam arti yang sempit merujuk pada pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan dalam lingkup ini dapat didefinisikan sebagai segala pengajaran yang diupayakan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan formal untuk anak atau remaja peserta didik agar memiliki kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Dalam lingkup luas terbatas, pendidikan dapat dimaknai sebagai segala

usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung sepanjang hayat, baik di dalam maupun di luar sekolah atau lembaga pendidikan formal, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan secara tepat dalam berbagai lingkungan kehidupan pada masa yang akan datang.⁵

Pendidikan merupakan rahim masyarakat atau bahkan rahim peradaban. Pendidikan berperan melahirkan suatu model masyarakat tertentu, dan darinyalah dimulai transformasi masyarakat ke pola yang lebih berkeeseimbangan. Dengan peran demikian, sangat jelas bahwa pendidikan harus senantiasa bersih, termasuk dalam dirinya sendiri. Pendidikan harus bebas dari syahwat patologis dan demagogis.

Repotnya, dalam "daging" dunia pendidikan kita masih tertancap beberapa "duri" yang menyulitkannya untuk menjalankan peran-peran idealnya. Aspek filosofi, subjek pembelajaran, sumber daya guru, dan beberapa aspek lainnya masih juga mewujud sebagai persoalan-persoalan "internal" pendidikan. Realitas ini seakan memperkuat kegelisahan Paulo Freire dan Ivan Illich soal dunia pendidikan. Mereka berdua pada dekade yang bersamaan (Freire: 1981, dan Illich: 1986) menyampaikan kritik pedas sekaligus menyadarkan banyak orang bahwa pendidikan yang selama ini dianggap sakral dan penuh kebajikan, ternyata mengandung juga apa yang mereka sebut "penindasan".⁶

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai

Pendidikan kewarganegaraan yang belakangan dikembangkan dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru, sangat berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan paradigma lama. Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru mengalami perubahan dalam beberapa aspeknya; visi, misi, substansi materi, strategi pengajaran, serta *performance*-nya. Dalam paradigma

⁵ Lihat Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 3-6.

⁶ Lihat Mansour Fakhri dalam William F. Oneil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002: x.

lama, PKN mewujudkan sebagai indoktrinasi kepentingan penguasa dan standar-standar moral secara monologis.

Yang kental membedakan PKN paradigma baru dengan paradigma yang lama adalah upaya untuk mengembalikan PKN ke dalam jalur ilmu sebagai bidang kajian yang terbuka, subjek pembelajaran dan pendidikan, dan bidang ilmu yang independen dari intervensi dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa.

Dengan paradigma baru tersebut, pendidikan kewarganegaraan dapat mengambil peran dalam rangka konstruksi, rekonstruksi, maupun resolusi persoalan-persoalan yang muncul di berbagai sektor kehidupan Bangsa Indonesia, melalui pembelajaran pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).⁷

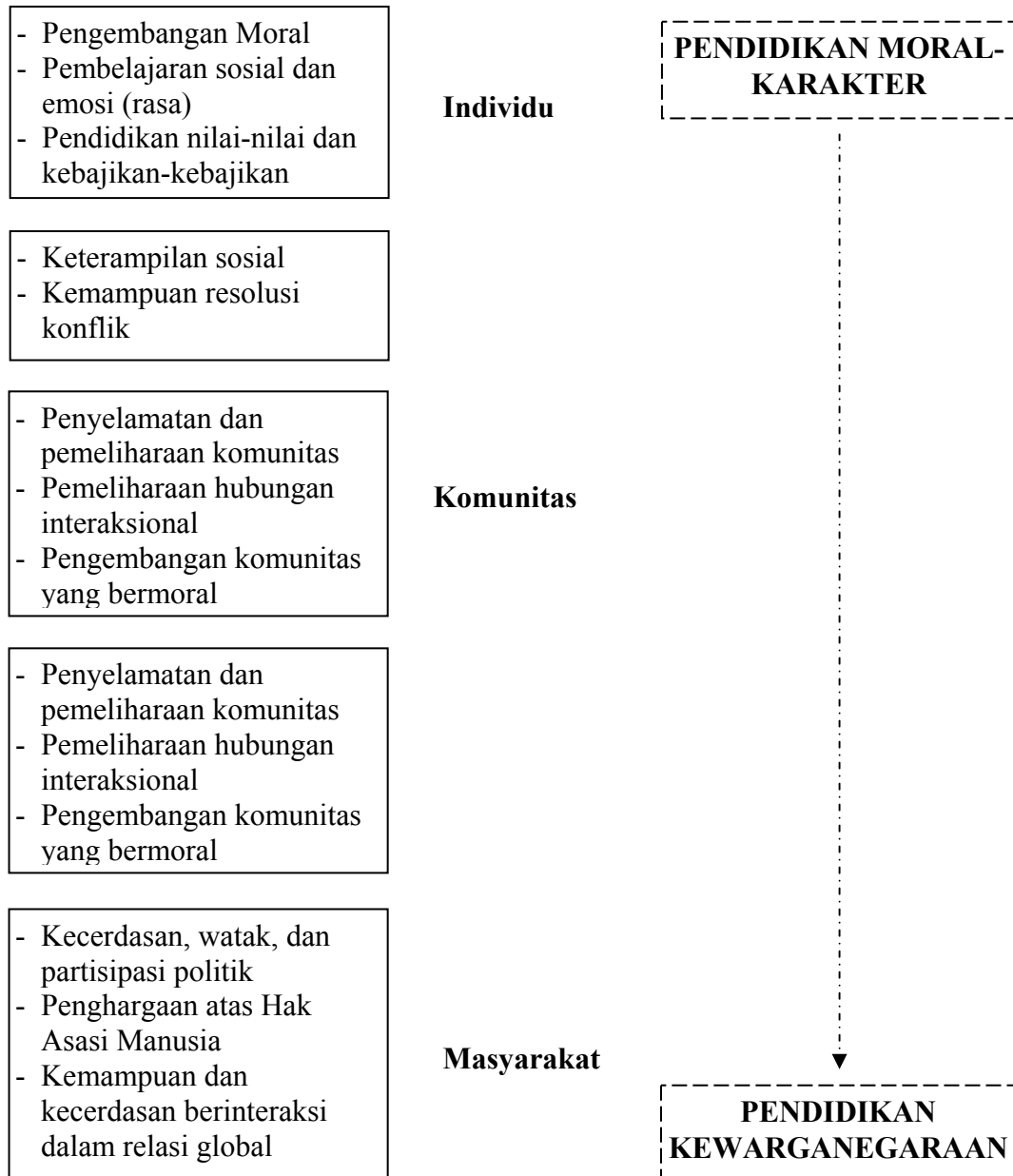
Dus, pada dasarnya pendidikan nilai merupakan salah satu komponen epistemologis pendidikan kewarganegaraan. Daniel Dakhidae (2001) mempertegas bahwa salah satu peran pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) adalah memberikan panduan penanaman nilai-nilai ideologis yang dianggap tinggi oleh suatu bangsa bagi generasi penerusnya, menjadikan manusia *homo novi ordinis*, yaitu manusia yang telah mencapai kesempurnaan hidup, berjiwa besar, dan berkebaikan sejati.⁸

Salah satu nilai yang dominan dipelajari bersama dalam pendidikan kewarganegaraan adalah etika atau moral. Pada sisi ini, pembelajaran etika dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi tiga kategori sekaligus, yakni etika deskriptif, etika normatif dan metaetika. Ketiga kategori etika tersebut merupakan subjek ajar PKN sebagai pendidikan moral atau pendidikan karakter.

⁷ Pengetahuan kewarganegaraan merupakan subjek ajar untuk mewujudkan kecerdasan warga Negara (*civic intelligence*), nilai-nilai kewarganegaraan untuk membangun watak warga negara (*civic dispositions*), sedangkan keterampilan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mendorong partisipasi warga Negara (*civic participations*).

⁸ Dikutip Halili, "Optimalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun dan Mengembangkan Nasionalisme Indonesia", makalah untuk Seleksi Peserta Pelayaran Kebangsaan IV, 2003, hal. 6.

Pendidikan moral memiliki keterkaitan gradual dengan pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana tergambar berikut⁹:



Membahas soal pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif demikian, kita teringat pada dinamika PKN pada fasenya sebagai pendidikan moral, yang dalam kurikulum formal disebut sebagai Pendidikan Moral Pancasila. Harus

⁹ Bandingkan dengan apa yang dikemukakan dalam *The Heart Matter of The Character and Citizenship in Alberta School*, Alberta: Learning and Teaching Resources Branch of Alberta Education, 2005, hal. 7

secara tegas kita katakan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada fase perkembangan tersebut secara substantive tidak benar-benar sebagai pendidikan moral. Sebab, pembelajaran di dalamnya hanya mencekoki moralitas-moralitas privat kepada peserta didik, sementara pada saat yang bersamaan mereka dipalingkan dari persoalan-persoalan etika publik, seperti soal korupsi dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, penyelewengan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat Negara, monopoli kesejahteraan ekonomi oleh konglomerasi dan lain sebagainya. Pembelajaran pun bersifat strukturalis dan mekanistik yang menekankan pada luaran berupa hafalan verbal.

Lokomotif Perubahan Moral

Meskipun korupsi, monopoli, pembunuhan, perkosaan, pencurian dan lain sebagainya marak, kita sangat menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada pendidikan koruptor, penilep, pembunuh, pemerkosa, perampok, dan semacamnya dalam sistem pendidikan kita. Yang membuat fenomena tersebut jelas kontribusi banyak aspek secara kompleks. "Memerangi" patologi tersebut jelas tidak dapat mengandalkan satu bidang tertentu dalam sistem pendidikan kita. Tidak juga kepada pendidikan kewarganegaraan.

Namun, secara objektif dalam sudut pandang keilmuan, pendidikan kewarganegaraan dapat mengambil porsi yang cukup besar untuk pembangunan karakter warga Negara yang sekaligus berarti perubahan moral mereka (sekali lagi, dalam konotasi yang positif). Pendidikan dapat mengambil inisiatif dan kepeloporan dalam misi tersebut. Sangat mungkin, banyak pihak akan menyoal "bukankah sejarah membuktikan kalau PMP sebagai pendidikan sebagai pendidikan nilai gagal?". Iya, namun struktur keilmuan yang dimiliki pendidikan kewarganegaraan saat ini harus membuktikan sebaliknya. Kompetensi, indikator, metode, dan evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan di satuan-satuan pendidikan dasar dan menengah telah menampakkan karakter yang jauh lebih ideal secara keilmuan daripada fase-fase sebelumnya.

Satu hal yang akan sangat menentukan pada akhirnya adalah guru. Kualitas tenaga pengajar merupakan komponen penting dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi lokomotif perubahan moral. Karakter guru (baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun profesi) menjadi salah satu dari anasir pokok yang menentukan efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan dan meningkatkan moralitas subjek belajar.

Di samping itu, sinergi guru dengan keluarga peserta didik harus terus dilakukan. Sebab, sangat kecil kemungkinan pendidikan di sekolah akan berhasil tanpa dukungan pendidikan di sekolah, sebagaimana juga hampir tidak mungkin berharap keberhasilan sepenuhnya keberhasilan pendidikan di sekolah dan keluarga, tanpa dukungan yang sinergis dari pendidikan di masyarakat.

Beberapa karakter penting dan kemampuan sinergi dengan keluarga yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dalam penanaman karakter bagi peserta didik adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Menjaga konsistensi. Perilaku tidak konsisten pada guru akan menjadi persoalan tersendiri bagi peserta didik, terutama pada usia-usia awal pendidikan anak (SD-SMP).
2. Memberikan struktur dan direksi bagi kehidupan peserta didik. Penanaman nilai tertentu tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Oleh karenanya guru harus mampu membuat apa yang diajarkan mengarahkan kehidupan riil mereka.
3. Menaruh harapan besar kepada peserta didik. Semakin tinggi harapan seorang guru atas muridnya tentang apa yang diajarkannya, semakin tinggi pula capaian sang murid. Riset Rosenthal dan Jacobson (1968), Brophy dan Everton (1981), dan Weinstein (1985) menguatkan hipotesis tersebut.
4. Menghadirkan kehidupan keluarga dalam pembelajaran. Penanaman nilai-nilai tertentu harus diberikan gambaran konkrit yang sangat dekat

¹⁰ Bandingkan dengan Houston dan Houston, "Needed: A New Knowledge Base in Teacher Education", dalam Leonard Kaplan (ed.), *Education and the family*, Massachusetts: Allyn and Bacon, 1992, hal. 260-263

dengan peserta didik. Lingkungan yang paling dekat dengan mereka adalah lingkungan keluarga. Menciptakan suasana keluarga dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang layak diupayakan.

5. Positif terhadap anak didik dan keluarganya. Pendidik yang baik akan memperlakukan anak didik sebagai layaknya anak dan orang tua sebagai partner dalam mendidik anak. Mengambil pertimbangan subjektif sepihak dalam mengatasi persoalan anak didik jelas bukan hal yang positif.
6. Empati terhadap kondisi anak. Mengenali karakter anak dan mendalami kediriannya menjadi modal penting bagi seorang guru dalam menanamkan nilai-nilai selama pembelajaran.
7. Mengintensifkan komunikasi dengan para orang tua. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya menanamkan nilai, dengan mempertimbangkan karakter peserta didik.
8. Fleksibel dan realistis dalam menaruh harapan terhadap orang tua. Guru harus baik, tapi orang tua peserta didik tidak selalu baik. Hal ini harus disadari juga oleh para guru agar mereka bisa menanamkan nilai-nilai tertentu secara terukur.
9. Membuat sekolah lebih terbuka dan tidak intimidatif. Pembelajaran yang diterapkan guru harus familiar, sehingga tidak menakutkan, dan lebih terbuka sehingga peserta didik tidak terkungkung dalam eksklusivitas sempit.

Pengembangan Aspek Moral PKN di tingkat SD dan SMP

Mengacu pada rancangan Puskur yang tertuang dalam materi sosialisasi KTSP, ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama) meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,

Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Aspek-aspek dalam ruang lingkup tersebut mensyaratkan kepribadian dan karakter yang hebat. Kualitas keterlibatan dan partisipasi anak di dalam berbagai

konteks mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, sampai pergaulan internasional sangat ditentukan oleh kualitas karakter, kepribadian, dan perilakunya.

Dengan demikian, seluruh aspek dalam ruang lingkup tersebut sebenarnya membuka ruang bagi guru untuk mengembangkan aspek moral. Apalagi di dalam KTSP terdapat beberapa Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) yang digariskan untuk tingkat Sekolah Dasar meletakkan dasar pengembangan moralitas dan kepribadian (*character education*) dalam pembelajaran. Seperti, a) Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan, b) Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah, c) Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah, d) Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah, e) Membiasakan hidup bergotong royong, dan sebagainya.

Sedangkan untuk SMP, aspek pengembangan karakter dan kepribadian dapat “tercium” pada beberapa kompetensi seperti a) Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, b) Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM), c) Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat, d) Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan seterusnya.

Yang menjadi tantangan bagi guru kemudian adalah bagaimana membelajarkan aspek moral dalam PKN sebagaimana dimaksud, baik di SD maupun SMP. Secara teoritik, pembelajaran aspek moral dalam pendidikan kewarganegaraan harus menekankan pada relevansi dan efektivitas. *Local content* dalam hal ini sangat dimungkinkan. Metode pembelajaran yang diterapkan harus efektif, misalnya dengan *modeling*, *role playing*, dan sebagainya. Sedangkan metode evaluasi juga harus dapat mengukur apa yang semestinya diukur dalam pendidikan nilai tersebut, misalnya pengamatan (*obserasi*), pemantauan (*monitoring*) dan catatan perkembangan (*anecdotal records*).

Secara praktis, pengembangan aspek moral dalam PKN sebaiknya dilakukan dengan mengembalikan pembelajaran dari yang selama ini (lebih tepatnya belakangan ini) ditekankan pada olah pikir ke penekanan pada olah rasa. Pendidikan moral seyogyanya tidak sekedar berpijak pada paradigma

metodik “...apa yang kamu pikirkan...”, akan tetapi lebih pada “...apa yang kamu rasakan...”. Hal demikian tentu lebih relevan untuk membangun sikap loyalitas, menghormati, tanggung jawab, kesetiakawanan sosial (solidaritas), empati dan sebagainya.

Penutup

Demikianlah, pendidikan kewarganegaraan dan pembelajarannya di kelas dapat (sekali lagi dapat!) menjadi lokomotif bagi perubahan moral masyarakat Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapakah kita menjadikannya sebagai lokomotif perubahan moral? Penulis termasuk yang berkeyakinan bahwa yang paling menentukan suatu hasil bukanlah “*the gun*”, tapi *man behind the gun*: orang, dan bukan alat. Jadi, guru adalah salah satu aktor sangat penting.

Dalam dekadensi moral yang sangat kompleks, berlebihan memang kalau hanya berharap kepada pendidikan kewarganegaraan. Semua bidang ilmu pada dasarnya berkewajiban menanamkan nilai-nilai moral. Ekonomi, hukum, kedokteran, politik, teknik, dan bidang lainnya berkeniscayaan untuk menanamkan nilai moral agar terlahir ekonom/pengusaha, aparat hukum, pejabat negara, dan sebagainya yang moralis. Jika demikian, kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu akan indah.

Sangat mudah diucapkan, tapi pasti sulit dalam pelaksanaan. Namun demikian, selalu ada harapan bagi masa depan kehidupan selama masih ada orang-orang yang gigih menyeru kebajikan-kebajikan.

Bahan Bacaan

Alberta Writing Team. 2005. *The Heart Matter of The Character and Citizenship in Alberta School*. Alberta: Learning and Teaching Resources Branch of Alberta Education

Cholisin. 2000. *IKN-PKN*. Jakarta: Universitas Terbuka

Franz Magnis-Suseno. 2003. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Halili. 2003. "Optimalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun dan Mengembangkan Nasionalisme Indonesia", *makalah* dalam rangka Seleksi Peserta Pelayaran Kebangsaan IV tahun 2003.
- K. Bertens. 2005. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- _____ 2007. *Keprihatinan Moral*. Yogyakarta: Kanisius
- Kaplan, Leonard, ed. 1992. *Education and Family*. Massachusetts: Allyn and Bacon
- Redja Mudyahardjo. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- William F. O'neil (terj.). 2002. *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

LAMPIRAN 1

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SEKOLAH DASAR

Kelas I, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan	1.1 Menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa 1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah 1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah
2. Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah	2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah 2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah

Kelas I, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah	3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya 3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah
4. Menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah	4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah 4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat

Kelas II, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Membiasakan hidup bergotong royong	1.1 Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong 1.2 Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah
2. Menampilkan sikap cinta lingkungan	2.1 Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan 2.2 Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam

Kelas II, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap demokratis	3.1 Mengenal kegiatan bermusyawarah 3.2 Menghargai suara terbanyak (mayoritas) 3.3 Menampilkan sikap mau menerima kekalahan

4. Menampilkan nilai-nilai Pancasila	4.1 Mengetahui nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari 4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari
--------------------------------------	--

Kelas III, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Mengamalkan makna Sumpah Pemuda	1.1 Mengetahui makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa 1.2 Mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari
2. Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat	2.1 Mengetahui aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar 2.2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar 2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar

Kelas III, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memiliki harga diri sebagai individu	3.1 Mengetahui pentingnya memiliki harga diri 3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan lain lain 3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri
4. Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia	4.1 Mengetahui kekhasan bangsa Indonesia, seperti kebhinekaan, kekayaan alam, keramahan 4.2. Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia

Kelas IV, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan	1.1 Mengetahui lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan 1.2 Menggambarkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi	2.1 Mengetahui lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi 2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi

Kelas IV, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Mengetahui sistem pemerintahan tingkat	3.1 Mengetahui lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti

pusat	MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK dll. 3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya	4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya 4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya

Kelas V, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah 2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok

Kelas V, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memahami kebebasan berorganisasi	3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi 3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat 3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah
4. Menghargai keputusan bersama	4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama 4.2 Mematuhi keputusan bersama

Kelas VI, Semester 1

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang

	berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari
2. Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia	2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada 2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen 2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah

Kelas VI, Semester 2

Stándar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara	3.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara 3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara
4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi	4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif 4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional

LAMPIRAN 2

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK SMP

Kelas VII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama	2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama 2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama

Kelas VII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)	3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat	4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

Kelas VIII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia	2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia 2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen
3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional	3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan nasional 3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia

Kelas VIII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan	4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi 4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan
5. Memahami kedaulatan	5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat

rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia	5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia
---	--

Kelas IX, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara	1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara
2. Memahami pelaksanaan otonomi daerah	2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

Kelas IX, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	3.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia 3.2 Mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global 3.3 Mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 3.4 Menentukan sikap terhadap dampak globalisasi
4. Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa	4.1 Menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa 4.2 Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan 4.3 Menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa